

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA TOMOHON

Olvy Beatriks Talangamin¹, Paulus Kindangen², Rosalina A.M. Koleangan³

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membuat kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tomohon. Desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah (kuncoro, 2006). Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Menurut Brata (2004) yang dikutip oleh Adi dan Harianto (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu PAD serta sumbangan dan bantuan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pertumbuhan Ekonomi*

ABSTRACT

Economic growth is one of the indicators used in determining the success of development. High economic growth can make people's welfare even better Economic growth can be defined as the development of activities in the economy that cause goods and services produced in the community increases (Sukirno, 2010). The purpose of this study is to analyze how the influence of PAD, DAU and DAK on economic growth in Tomohon City. Decentralization means the handover of government affairs from upper level regional governments to regions (kuncoro, 2006). The higher the PAD obtained by a region, the higher the economic growth in the region. According Brata (2004) cited by Adi and Harianto (2007) states that there are two components of local revenue that significantly positive effect on regional economic growth that is PAD and donations and assistance. The analysis technique used is multiple regression analysis. The result of research shows that the original revenue of the region has positive but not significant effect on the economic growth. general allocation funds have a significant positive effect on economic growth. special allocation funds have a significant positive effect on economic growth.

Keywords: *Pendapatan Asli Daerah (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Economic Growth*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membuat kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Todaro (2000) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan mengalokasikan secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat meratakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing.

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah merasakan dampak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Sistem otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan mengurangi campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan ini didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004) tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kota Tomohon merupakan salah satu kota yang berada di Sulawesi Utara yang populer disebut dengan kota bunga. Potensi Kota Tomohon yang besar di sektor pertanian memberikan peluang kepada pemerintah dalam mengembangkan potensi yang ada seperti program festival flower yang diadakan setiap tahunnya dan juga potensi-potensi pariwisata yang ada kuliner yang mampu menarik masyarakat lokal maupun wisatawan mengunjungi Kota Tomohon. Selain itu juga memberikan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada di Kota Tomohon dengan potensi yang dikembangkan. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membuat kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Todaro (2000) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi (PE) Kota Tomohon 2005-2016

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2005	4,15
2006	5,65
2007	5,42
2008	8,96
2009	6,09
2010	6,10
2011	6,17
2012	6,86
2013	6,38
2014	6,31
2015	6,12
2016	4,11

Sumber: Tomohon Dalam Angka

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon selama dua belas tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon sebesar 4.15 persen mengalami peningkatan pada tahun 2006 menjadi 5.65 persen akan tetapi pada tahun 2007 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 5.42 persen. Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon meningkat menjadi 8.96 persen akan tetapi tahun 2009 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 6.09 persen, pada tahun 2010 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 6.10 persen terus meningkat sampai tahun 2012 sebesar 6.86 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 6.38 persen dan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2016 menjadi 4.11 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006). Darise (2009:48) mengartikan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang didapat daerah dari pemungutan atas dasar tata tertib daerah yang berdasarkan pada susunan perundang-undangan. Mamesah (1995) menyatakan besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil- hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

Pendapatan Kota Tomohon jika ditinjau menurut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon
Tahun 2005-2016

Tahun	PAD
2005	2.655.369.792
2006	5.295.375.891
2007	4.118.536.000
2008	5.480.141.265
2009	6.229.601.002
2010	5.713.312.995
2011	8.058.779.622
2012	11.241.635.125
2013	13.945.339.275
2014	20.100.568.636
2015	24.657.382.659
2016	26.011.141.966

Sumber: Tomohon Dalam Angka

Tabel 2 menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap tahunnya dari total PAD sejak tahun 2005-2016. Hal ini menggambarkan bahwa PAD Kota Tomohon mengalami pertumbuhan yang semakin baik pada lima tahun terakhir. Tahun 2012 PAD Kota Tomohon sebesar 11.241.635.125 juta rupiah naik dari tahun sebelumnya, tahun 2013 PAD Kota Tomohon naik menjadi 13.945.339.275 juta rupiah tahun 2014 juga naik menjadi 20.100.568.636 juta rupiah dan pada tahun 2015 PAD Kota Tomohon naik menjadi 24.657.382.659 juta rupiah sampai pada tahun 2016 naik menjadi 26.011.141.966. Kenaikan PAD Kota Tomohon ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menggali dan meningkatkan potensi yang ada juga dengan upaya mengenalkan Kota Tomohon dengan program-program pariwisata seperti festival flower yang tiap tahun diadakan. Berikut tabel 3 menunjukan pendapatan daerah jika ditinjau berdasarkan Dana Perimbangan yang mencakup dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota Tomohon pada tahun 2005-2016:

Tabel 3
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kota Tomohon Tahun 2005-2016

Tahun	DAU	DAK
2005	51.820.622.512	8.437.126.479
2006	182.417.125.594	46.590.495.866
2007	182.495.000.000	68.710.000.000
2008	186.005.760.642	67.364.871.024
2009	182.362.535.270	44.705.165.031
2010	219.721.446.000	20.799.100.000
2011	247.205.869.000	34.558.700.000
2012	287.651.390.000	26.955.150.000
2013	330.892.646.000	41.782.340.000
2014	376.334.135.000	37.483.280.000
2015	360.894.361.000	57.711.980.000
2016	401.799.456.000	178.990.125.263

Sumber: Tomohon Dalam Angka

Tergambar dari tabel 3 pada tiga tahun terakhir realisasi Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2005 dana alokasi umum sebesar 51.820.622.512 juta rupiah mengalami peningkatan pada tahun 2006 menjadi 182.417.125.594 juta rupiah terus mengalami peningkatan sampai tahun 2014 menjadi 376.334.135.000 juta rupiah pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 360.894.361.000 juta rupiah pada tahun 2016 meningkat menjadi 401.799.456.000 juta rupiah.

Tahun 2005 dana alokasi khusus sebesar 8.437.126.479 juta rupiah meningkat pada tahun 2007 menjadi 68.710.000.000 juta rupiah pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 67.364.871.024 juta rupiah dana alokasi khusus terus mengalami penurunan sampai tahun 2010 menjadi 20.799.100.000 juta rupiah. Tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 34.558.700.000 juta rupiah tahun 2012 turun menjadi 26.955.150.000 juta rupiah. Tahun 2013 meningkat menjadi 41.782.340.000 juta rupiah tapi pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 37.483.280.000 juta rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 178.990.125.263 juta rupiah.

Dana Alokasi Umum memiliki kontribusi terbesar pada Dana Perimbangan Kota Tomohon pada setiap tahunnya, dan selalu mengalami peningkatan. Jika pengalokasian Dana Alokasi Umum dilakukan dengan baik akan mampu membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah nantinya, dengan lebih fokus pada pembangunan daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah setelah otonomi daerah dituntut untuk dapat membiayai diri sendiri melalui sumber keuangan yang dikuasai dan kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah, guna terpenuhinya pembangunan ekonomi daerah.

Tinjauan Pustaka

Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya (*Todaro & Smith*, 2011). Ketiga komponen pokok dari definisi ini sangatlah penting maknanya bagi suatu perekonomian (*Arsyad*, 2010) yaitu.

- 1) Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kemampuan suatu perekonomian dalam menyediakan berbagai berbagai macam barang ekonomi, dan juga tanda kematangan ekonomi.

- 2) Kemajuan teknologi merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun bukan syarat cukup (*sufficient condition*) dalam merealisasikan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru
- 3) Penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi harus segera dilakukan. Adanya inovasi teknologi tanpa adanya inovasi sosial ibarat sebuah bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi ada namun tanpa input yang melengkapi, tidak akan berarti apa-apa.

Di negara-negara maju, ada beberapa tekanan untuk menggeser orientasi pada pertumbuhan ekonomi menuju ke upaya-upaya yang lebih memperhatikan kualitas hidup (*quality of life*). Sementara itu, Negara sedang berkembang (NSB) yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Banyak orang merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah gagal untuk menghilangkan atau bahkan mengurangi luasnya kemiskinan *absolute* di NSB karena tingkat pengangguran dan pengangguran semu meningkat di daerah pedesaan dan perkotaan. Proses penetesan ke bawah (*trickle down effect*) dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi orang miskin tidak terjadi (Arsyad, 2010).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah.

Dana Alokasi Khusus

Perundangan yang mengatur Dana Alokasi Khusus adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 39, pasal 40 dan pasal 41. DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah Daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja daerah (Anggraeni dan suhardjo, 2010).

Menurut Darise (2009:91) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah: “Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan antara variable Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Kota Tomohon dengan pengambilan data penelitian melalui dinas pendapatan daerah (Dispenda) Kota Tomohon. Waktu penelitian adalah dari tahun 2005-2016.

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis tabel dan analisis kuantitatif berupa metode regresi linear berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Microsoft Excel 2013* dan *Eviews 0.8*.

Analisis Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*). Model analisis regresi berganda sebagai berikut

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y	= Pertumbuhan Ekonomi
X ₁	= Pendapatan Asli Daerah
X ₂	= Dana Alokasi Umum
X ₃	= Dana Alokasi Khusus
α	= Konstanta/ Intercept
β	= Koefisien Regresi
e	= Standar Error

Metode kuadrat terkecil/*Ordinary least square* merupakan estimasi titik sampel, karena itu masalah verifikasi estimasi titik tersebut melalui interal estimasi maupun uji hipotesis melalui uji t. dengan menggunakan table distribusi t kita mendapatkan nilai t kritis (t_c) dengan signifikansi $t_{\alpha/2}$ dan df (*degree of freedom*) n-k dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter estimasi termasuk konstanta. (Widarjono, 2016 : 59).

Didalam hasil perhitungan regresi berganda analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuatnya tingkat hubungan linear antara dua variabel. Untuk mengukur kuatnya hubungan (korelasi) antara dua variabel X diberi symbol r_{xy} atau r saja. Nilai letaknya antara -1 dan 1, nilai r = 1, berarti hubungan X dan Y sempurna dan positif. Nilai r = 0, berarti hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan.

Kalau tidak ada hubungan, naik turunnya X tidak dipengaruhi Y, sedangkan, kalau hubungannya positif, pada umumnya kenaikan (penurunan) X, menyebabkan kenaikan (penurunan) Y, sebaliknya untuk hubungan yang negative pada umumnya kenaikan (penurunan) X menyebabkan penurunan (kenaikan) Y. (Widarjono, 2013 : 7).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regresi Berganda

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan *evIEWS* untuk mengetahui pengaruh antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y1) (variabel dependen) PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X2) (variabel independen) di Kota Tomohon:

Tabel 4
Hasil Regresi

Dependent Variable: PE Method: Panel Least Squares				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	0.006335	0.608753	0.010406	0.9918
DAU	1.744233	1.036512	1.682791	0.1146
DAK	2.825747	1.706146	1.656217	0.1199
C	-43.02030	25.04841	-1.717486	0.1079
R-squared	0.279415			
F-statistic	1.809554			

Hasil Olah Eviews 8.0

Hasil estimasi pendapatan asli daerah (X1) pada tabel 4 menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Nilai probabilitas ini lebih kecil dari $\alpha = 10\%$, maka H_a ditolak H_0 diterima. Variabel pendapatan asli daerah (X1) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 0.010406 dan t_{tabel} 1.396 dengan df 8 ($n-k=12-4=8$). Jadi, $t_{hitung} 0.010406 < t_{tabel} 1.859$ Artinya pendapatan asli daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi dana alokasi umum (X2) pada tabel 4 menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Nilai probabilitas ini lebih besar dari $\alpha = 10\%$, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel dana alokasi umum (X2) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 1.682791 dan t_{tabel} 1.396 dengan df 8 ($n-k=12-4=8$). Jadi, $t_{hitung} 1.682791 > t_{tabel} 1.396$ Artinya dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi dana alokasi khusus (X3) pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Nilai probabilitas ini lebih besar dari $\alpha = 10\%$, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel dana alokasi khusus (X3) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 1.656217 dan t_{tabel} 1.396 dengan df 8 ($n-k=12-4=8$). Jadi, $t_{hitung} 1.656217 > t_{tabel} 1.396$ Artinya dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji Simultan (Uji f)

Nilai F-statistik yang diperoleh 1.809554 sedangkan F-tabel 2,92. Nilai F table berdasarkan besarnya $\alpha = 10\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/4-1) = 3$ dan df untuk denominator $(n-k/12-4) = 8$. Dengan demikian F-statistik lebih kecil dari F-tabel yang artinya bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Koefisien Determinan (R^2)

Dari nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar $0.279415 = 27.94\%$. Artinya, bahwa variable pertumbuhan ekonomi (Y) 27,94% variasinya dijelaskan oleh variasi variable PAD (X1) DAU (X2) dan DAK (X3), sisanya 72,6% di jelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh positif antar pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi artinya, apabila pendapatan asli daerah meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan *ceteris paribus*.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak antara lain Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak ialah hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita, 2007).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (Hirawan, 2007).

Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Sutrisno (1984: 200) pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswiyanti (2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Otonomi daerah memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri pendapatannya termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Laju perekonomian di suatu daerah juga dipengaruhi oleh sarana prasarana di daerah tersebut, semakin baik fasilitas sarana dan prasarana di daerah tersebut maka akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryati dan Ulfi (2010).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permonasari (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil uji t diperoleh dari nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Maryati dan ulfi (2010). Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan tingkat PAD yang tinggi, maka pemerintah daerah lebih bisa untuk mengoptimalkan potensi PAD tersebut. Karena PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki. Salah satunya dengan cara memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan. Dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh positif antar dana alokasi umum dengan pertumbuhan ekonomi artinya, apabila dana alokasi umum meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan *ceteris paribus*.

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya.

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007), menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswiyanti (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hibah ini dapat digunakan untuk banyak tujuan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) ini salah satu dana perimbangan yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di daerah tersebut. Dan diharapkan dari pembangunan tersebut dapat berdampak terhadap laju Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut agar tidak terjadi ketimpangan fiskal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2013) menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < a = 0,05$. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fabianus (2012), Maryati (2010), serta Setyawati (2007). Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang diterima pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal. Hal ini tidak jauh beda dari peran PAD yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh positif antar dana alokasi khusus dengan pertumbuhan ekonomi artinya, apabila dana alokasi khusus meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan *ceteris paribus*.

Menurut Darise (2009:91) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah: "Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN." Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah Daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja daerah (Anggraeni dan suhardjo, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswiyanti (2015) adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi tetapi kearah negatif. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Ahmad Subekan, 2012:88). Salah satu contoh kebutuhan khusus dan merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain

: kebutuhan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigrasi primer. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), karena Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional. Sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) suatu daerah semakin tinggi tidak selalu semakin tinggi pula laju Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut. Karena Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya digunakan untuk membiayai pembangunan yang menjadi kebutuhan daerah dan yang merupakan prioritas nasional.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2013) menyatakan bahwa DAK berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil uji t diperoleh dari nilai signifikan sebesar $0,451 > \alpha = 0,05$. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Maryati (2010), Setyawati (2007), serta Akbar (2012). Hal ini disebabkan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan, dan lain-lain. Artinya tidak boleh disalahgunakan/digunakan untuk kegiatan di luar ketentuan.

2. PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh positif antar pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi artinya, apabila pendapatan asli daerah meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan *ceteris paribus*.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh positif antar dana alokasi umum dengan pertumbuhan ekonomi artinya, apabila dana alokasi umum meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan *ceteris paribus*.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh positif antar dana alokasi khusus dengan pertumbuhan ekonomi artinya, apabila dana alokasi khusus meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan *ceteris paribus*.

Saran

Pemerintah Kota Tomohon lebih mengoptimalkan lagi untuk potensi-potensi yang ada di daerah sebagai pemasukan untuk pendapatan asli daerah. Pos-pos pendapatan asli daerah ini jika bisa dikelola dengan baik bisa berdampak pada peningkatan lapangan kerja artinya bisa menyerap tenaga kerja menekan angka pengangguran dan memicu pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Anggraeni, Unun Dian dan Suhardjo, Yohanes. 2010. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. *Solusi*, Vol. 9 No. 1, Januari 70 2010 : 69 –81
- Bastian, Indra, 2006a, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Elita. 2007. *Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : Rajawali.
- Hirawan, Susiyati, B. 2007. "Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin)Di Indonesia", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap di FEUI Jakarta*. Tidak dipublikasikan.

- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010.** *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat.* Jurnal Akuntansi dan Manajemen, vol 5, No. 2, Desember 2010.
- Mamesah, D.J., 1995,** "Sistem Administrasi Keuangan Daerah", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nurlan Darise. (2009).** *Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif.* Jakarta: Indeks.
- Siswiyanti, Pungky.** "Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Akruak Akutansi*, 2015.
- Sadono, Sukirno. 2010.** *Makroekonomi. Teori Pengantar.* Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sutrisno 1984: 200,** " *Konsep Pendapatan Asli Daerah*" Rajawali
- Subekan, Achmat. 2012.** *Keuangan Daerah.* Malang: Dioma.
- Todaro, Michael P. 2000.** *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.* Erlangga. Jakarta.
- Tulus Tambunan. 2006.** *Iklim Investasi Di Indonesia: Masalah, Tantangan Dan Potensi.* Jakarta : Kadin-Indonesia – Jetro.
- Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C. 2011.** *Economic Development.* Eleventh Edition. United States: Addison Wesley.
- Permanasari, Windha Amiga. 2013.** *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2009-2011).* *Artikel Publikasi.* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yulia Yustikasari, Darwanto. 2007.** "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. SNA X
- Zuwesty Eka Putri, 2015,** Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999** tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.